

# Pesantren, Politik, dan Persatuan: Kontribusi Islam dalam Membangun Indonesia dari Masa Kolonial hingga Reformasi

Muhammad Agil Munawwar<sup>1</sup>, Ahmad Jamin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

✉ Korespondensi: [m.agilmunawwar@gmail.com](mailto:m.agilmunawwar@gmail.com)

Article History      DOI: [10.20885/tullab.vol8.iss2.art12](https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss2.art12)

Submitted           : June 30, 2025

Accepted             : May 4, 2026

Published            : May 10, 2026

## ABSTRACT

*This research analyzes the contribution of Islam to the nation-building of Indonesia from the colonial period to the reform era through a qualitative approach and historical-documentary analysis. The focus of the research includes three main aspects: (1) the role of Islamic politics in the struggle for independence and the formation of the state foundation, including the compromise of the Jakarta Charter which influenced Pancasila; (2) the contribution of Islamic education through the integration of the pesantren-madrasah system with the national curriculum; and (3) the practice of religious moderation as a basis for social harmony in a multicultural society. The results show that inclusive and adaptive Islamic values have played a central role in shaping national identity, while also serving as an important pillar in advancing a just and civilized Indonesia. Islamic organizations such as NU and Muhammadiyah have not only played a role in political movements but have also been active in advancing education, gender equality, and social harmony through the wasathiyah (moderation) approach. This study also reveals how Islam Nusantara serves as a bridge between tradition and modernity, with concrete evidence such as the construction of the Silaturahmi Tunnel between the Istiqlal Mosque and the Cathedral Church as a symbol of tolerance. Holistically, this research confirms that Islam has made multidimensional contributions spiritual, intellectual, social, and political throughout Indonesia's historical trajectory, with the principle of moderation serving as the key to national integration.*

**Keywords:** *Islamic Boarding School; Islamic Politics; Religious Moderation; The Unitary State of the Republic of Indonesia*

## ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis kontribusi Islam dalam pembangunan bangsa Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi melalui pendekatan kualitatif dan analisis historis-dokumenter. Fokus penelitian meliputi tiga aspek utama: (1) peran politik Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan dasar negara, termasuk kompromi Piagam Jakarta yang memengaruhi Pancasila; (2) kontribusi pendidikan Islam melalui integrasi sistem pesantren-madrasah dengan kurikulum nasional; serta (3) praktik moderasi beragama sebagai landasan kerukunan sosial di masyarakat multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang inklusif dan adaptif berperan sentral dalam pembentukan identitas kebangsaan, sekaligus menjadi pilar penting dalam memajukan Indonesia yang berkeadilan dan beradab. Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah tidak hanya berperan dalam pergerakan politik, tetapi juga aktif dalam memajukan pendidikan, kesetaraan gender, dan harmoni sosial melalui pendekatan wasathiyah (moderasi). Studi ini juga mengungkap bagaimana Islam Nusantara menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, dengan bukti konkret seperti pembangunan Terowongan Silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral sebagai simbol toleransi. Secara holistik, penelitian ini menegaskan bahwa Islam telah memberikan kontribusi multidimensi spiritual, intelektual, sosial, dan politik dalam lintasan sejarah Indonesia, dengan prinsip moderasi sebagai kunci integrasi nasional*

**Kata Kunci:** *Pesantren, Politik Islam, Moderasi Beragama, NKRI*

## 1. PENDAHULUAN

Islam telah menjadi bagian integral dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia sejak awal masuknya melalui jalur perdagangan dan dakwah pada abad ke-13. Kedatangan Islam tidak hanya membawa nilai-nilai spiritual, tetapi juga memperkuat jaringan sosial melalui lembaga seperti pesantren dan peran ulama sebagai pemersatu masyarakat. Pada masa kolonial, Islam menjadi simbol perlawanan, seperti dalam Perang Diponegoro (1825–1830) dan Perang Aceh (1873–1904), yang dipicu oleh semangat jihad melawan penindasan asing (Ricklefs, 2008). Nilai-nilai keislaman ini kemudian menjadi fondasi gerakan kebangsaan, memadukan kesadaran religius dengan nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan.

Lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, berperan sebagai pusat pencerdasan bangsa yang inklusif. Organisasi Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) memperkenalkan sistem pendidikan hybrid, menggabungkan kurikulum agama dengan ilmu umum, sehingga melahirkan generasi intelektual Muslim yang berkontribusi pada kemajuan bangsa. (Azra, 2004) Selain itu, Islam Nusantara sebuah konsep yang mengakomodasi budaya lokal menjadi model pendidikan toleran, seperti terlihat dalam wayang kulit yang diisi nilai-nilai Islam oleh Sunan Kalijaga. (Woodward, 2011) Pendekatan ini menegaskan peran Islam sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas.



Kontribusi Islam dalam ranah politik tercermin dari peran tokoh Muslim seperti Mohammad Natsir dan KH Wahid Hasyim dalam perumusan Pancasila. Meskipun aspirasi formalisasi syariat Islam dalam Piagam Jakarta ditolak, kompromi tercapai melalui sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menjamin hak beragama sekaligus mengakui nilai-nilai universal Islam.(Boland, 1971) Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah juga aktif menjaga harmoni antara agama dan negara, menolak radikalisme sambil mendorong partisipasi politik umat Islam dalam demokrasi.(Hefner, 2000) Hal ini menunjukkan kemampuan Islam beradaptasi dengan prinsip negara pluralistic.

Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan sosial, tetapi juga aktif dalam memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Melalui program pemberdayaan perempuan, seperti Fatayat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah, mereka mendorong kesetaraan gender dan partisipasi politik perempuan, yang tercermin dalam meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen dan lembaga publik. Inisiatif seperti Sekolah Demokrasi NU dan kampanye anti-kekerasan berbasis agama menunjukkan komitmen dalam membangun tatanan masyarakat yang inklusif.(Hefner, 2000) Selain itu, keterlibatan dalam isu lingkungan seperti fatwa MUI tahun 2014 tentang perlindungan satwa langka dan larangan pembakaran hutan mencerminkan integrasi nilai ekofeminisme dan etika lingkungan dalam wacana keislaman. Gerakan ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya berkontribusi pada pembangunan manusia, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis.

Walaupun umat muslim berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia, tetapi umat muslim juga menghadapi berbagai macam tantangan seperti dari presiden soekarno seorang tokoh sekuler di indonesia, yang mana presiden soekarno menolak pendapat pihak muslim dalam perumusan dasar negara

Artikel ini mengkaji kontribusi Islam dalam pembentukan dan pengembangan Indonesia sebagai bangsa melalui pendekatan historis-analitis. Penelitian berfokus pada tiga ranah utama: *pertama*, peran politik Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan formulasi dasar negara, termasuk dinamika Piagam Jakarta dan komprominya dalam Pancasila; *kedua*, kontribusi pendidikan melalui sistem pesantren-madrasah dan integrasinya dengan kurikulum nasional; serta *ketiga*, praktik moderasi beragama sebagai perekat sosial di masyarakat multikultural.



## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan histori-dokumenter untuk menganalisis kontribusi Islam dalam pembangunan bangsa Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi data historis secara mendalam melalui kajian kritis terhadap dokumen-dokumen primer dan sekunder. Fokus penelitian meliputi tiga aspek utama: peran politik Islam, kontribusi pendidikan, dan praktik moderasi beragama dalam konteks kebangsaan.

Sumber data terdiri dari dua jenis. Pertama, data primer meliputi dokumen historis seperti Piagam Jakarta, naskah UUD 1945, dan arsip organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Kedua, data sekunder diperoleh dari buku-buku akademis, jurnal terindeks Sinta, dan artikel ilmiah terkait topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas penulis, dan ketersediaan akses.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan langkah-langkah sistematis. Tahap awal meliputi eksplorasi literatur menggunakan kata kunci seperti "Islam dan kebangsaan" serta "peran pesantren". Selanjutnya dilakukan verifikasi sumber melalui kritik eksternal untuk memastikan keaslian dokumen dan kritik internal untuk mengevaluasi konsistensi isi (Noer, 1987). Data yang terkumpul kemudian dikategorisasi berdasarkan tema penelitian utama.

Analisis data dilakukan secara kritis melalui tiga tahapan. Pertama, heuristik berupa pengorganisasian data berdasarkan tema. Kedua, interpretasi dengan pendekatan content analysis dan hermeneutik untuk memahami makna teks dalam konteks historisnya (Ma'arif, 2006). Terakhir, historiografi atau penyajian temuan dalam bentuk narasi ilmiah yang koheren. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen dan referensi (Boland, 1971).

Penelitian ini mematuhi prinsip etika akademik yang ketat. Setiap kutipan dan referensi dicantumkan secara transparan menggunakan gaya APA edisi ketujuh. Peneliti juga menghindari plagiarisme dengan melakukan parafrase dan sitasi yang tepat. Keterbatasan metode ini terletak pada kelangkaan beberapa dokumen primer periode kolonial, namun hal ini diatasi dengan memanfaatkan sumber sekunder yang kredibel dan telah melalui proses *peer-review*.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Temuan Penelitian

##### **Kontribusi Islam dalam Membangun Politik Indonesia**

Dalam konteks sejarah Indonesia, dinamika politik tidak dapat dipisahkan dari peran Islam sebagai agama mayoritas dan pengaruh kolonialisme Belanda di Nusantara. Kemunduran Kerajaan Majapahit menandai berkurangnya dominasi Hindu di wilayah ini, sementara kerajaan-kerajaan Islam mulai bermunculan di berbagai daerah di luar Aceh. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh Islam mulai menguat di wilayah-wilayah kecil, yang kemudian menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh kekuatan asing yang berusaha menguasai Nusantara. Namun, perkembangan Islam saat itu tidak lepas dari intervensi kolonial Belanda, yang telah membuka jalur perdagangan di Nusantara sebuah wilayah yang kaya akan rempah-rempah, kesuburan tanah, serta lokasi maritim yang strategis.

Awal mula gerakan politik Islam di Nusantara dapat ditelusuri melalui sejarah berdirinya Syarekat Islam (SI) yang pada masa awal pembentukannya berfungsi sebagai representasi identitas nasional dan semangat kebangsaan bagi umat Islam melalui perjuangan berbasis ideologi politik. Melalui SI, Islam berperan sebagai perekat solidaritas kebangsaan yang mempersatukan berbagai elemen Masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Budi Utomo yang eksklusif, Syarikat Islam (SI) sejak awal berdirinya menerapkan strategi inklusif dengan merangkul seluruh golongan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Organisasi ini beberapa kali mengalami perubahan nama: menjadi Partai Syarikat Islam (PSI) pada 1923, kemudian berganti menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur (PSIHT) pada 1927, dan akhirnya resmi menggunakan nama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada 1930. Dalam Kongres SI di Bandung dan Jakarta tahun 1917, terlihat pengaruh ideologi sosialis-revolusioner yang diperkenalkan oleh Semaun selaku ketua SI cabang Semarang, Ia berupaya mengubah orientasi SI dengan mengajukan dua proposal utama: pertama, menolak keterlibatan dalam kegiatan Hindia Belanda terkait Perang Dunia I; kedua, menarik perwakilan SI dari Volksraad

Sejak masa proklamasi kemerdekaan, organisasi Persis telah memberikan kontribusi signifikan dalam pergerakan politik umat Islam, berkolaborasi dengan kelompok nasionalis



dan berbagai pemikiran politik mereka. Dalam wacana ketatanegaraan, Persis terlibat aktif dalam diskusi ketika Presiden Soekarno mengemukakan konsep sekularisasi negara yang terinspirasi dari model Kemal Attaturk di Turki. Namun, Soekarno menegaskan bahwa pemisahan formal antara agama dan negara tidak berarti mengeliminasi peran nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa. Menurut pandangan Soekarno, masyarakat tetap dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam melalui mekanisme demokrasi, khususnya lewat lembaga perwakilan rakyat.

Pada periode awal kemerdekaan Indonesia, aktivitas politik Persis memiliki keterkaitan erat dengan Partai Masyumi. Setelah resmi berdiri kembali tahun 1948, organisasi ini memperoleh status sebagai anggota khusus Masyumi, dengan anjuran bagi seluruh anggotanya untuk bergabung dengan partai tersebut. Dua figur penting Persis, Mohammad Natsir dan Isa Anshary, bahkan berhasil menduduki posisi strategis di struktur kepengurusan pusat Masyumi.

Persis secara tegas mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu dipimpin oleh figur-figur nasionalis sekuler, dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Menurut pandangan Isa Anshary, partisipasi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan tidak hanya sebagai bentuk kewajiban religius, tetapi juga upaya untuk membentuk negara yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

### **Kontribusi Islam dalam Perumusan UUD 1945**

Piagam Jakarta mencerminkan representasi politik umat Islam yang dianggap mewujudkan kehendak mayoritas bangsa Indonesia, baik secara substantif melalui kandungan isinya maupun secara kuantitatif melalui komposisi anggota perumusannya. Figur-figur kunci dalam perumusan dokumen ini mencakup berbagai spektrum ideologi, termasuk: Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai representasi nasionalis Muslim sekuler; A.A. Maramis dari kalangan nasionalis Kristen sekuler; serta sejumlah tokoh Islam seperti Abikoesno Tjokrosuejoso (PSII), Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), Haji Agus Salim (Partai Penyardar), dan Abduh Wahid Hasjim (NU). Kelompok ini dilengkapi oleh Ahmad Soebardjo dan Muhammad Yamin yang menganut paham nasionalis Muslim sekuler.

Dalam sidang paripurna, Wahid Hasyim sebagai salah satu tokoh Muslim terkemuka mengajukan dua proposal penting. Proposal pertama mengusulkan penyisipan frasa "yang beragama Islam" pada Pasal 4 Ayat 2, dengan argumentasi bahwa kepemimpinan seorang Presiden Muslim akan mempermudah implementasi kebijakan berbasis syariat Islam. Untuk



Pasal 28, beliau mengusulkan penetapan Islam sebagai agama resmi negara sambil tetap menjamin kebebasan beragama bagi pemeluk agama lain.

Haji Agus Salim mengajukan pertanyaan kritis mengenai konsekuensi logis dari persyaratan keislaman Presiden, termasuk implikasinya terhadap posisi Wakil Presiden dan para duta besar. Beliau mempertanyakan konsistensi kebijakan ini dengan komitmen perlindungan terhadap pemeluk agama lain. Usulan Wahid Hasyim ini justru mendapatkan dukungan dari Sukiman yang berargumen bahwa perubahan redaksional tersebut bersifat simbolis tanpa dampak substantif, sekaligus dapat memenuhi aspirasi masyarakat mayoritas.

Dokumen bersejarah Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945 mencerminkan kesepakatan politik antara kalangan Islamis dan kelompok nasionalis sekuler. Walaupun mengalami revisi pada 18 Agustus 1945, pengaruh pemikiran Islam tetap terlihat jelas dalam rumusan awal sila pertama Pancasila yang sempat mencantumkan frasa "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Perubahan redaksional menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" tetap mempertahankan esensi nilai-nilai ketuhanan dalam perspektif Islam. Dalam semangat menjaga integrasi nasional, para tokoh Muslim terkemuka termasuk Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo dengan ikhlas menerima penghapusan "tujuh kata" kontroversial tersebut.

### **Kontribusi Islam dalam Mempersatukan Keberagaman Masyarakat Indonesia**

Masyarakat Indonesia menunjukkan keragaman yang kompleks, tidak hanya dalam komposisi demografis penduduknya, tetapi juga dalam aspek linguistik, tradisi budaya, keyakinan agama, dan latar belakang etnis. Negara ini menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk membangun kesatuan dalam kemajemukan, di tengah banyaknya perbedaan yang ada.

Sebagai bangsa yang berketuhanan, Indonesia menjadikan prinsip ini sebagai landasan negara melalui sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945. Keduanya mengakui dasar ketuhanan dalam kehidupan bernegara sekaligus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat. Secara formal, pemerintah mengakui enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Moderasi beragama berperan sebagai jembatan yang memadukan semangat religiusitas dengan rasa cinta tanah air. Upaya kolektif diperlukan untuk menjadikan toleransi antarumat beragama sebagai perekat persatuan nasional. Dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur



bangsa, yaitu terciptanya masyarakat berperadaban maju dan berkebudayaan adiluhung, penerapan moderasi beragama menjadi prasyarat mutlak bagi keutuhan NKRI.

Masyarakat Indonesia telah mewujudkan komitmen nyata dalam mempererat hubungan antarumat beragama melalui pembangunan terowongan penghubung antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi menginaugurasi Terowongan Silaturahmi pada Kamis, 12 Desember 2024. Proyek infrastruktur ini memiliki makna yang jauh melampaui aspek fisik semata, melainkan merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia. Terowongan tersebut tidak hanya menghubungkan dua bangunan ibadah secara fisik, tetapi juga menciptakan ikatan simbolis yang merepresentasikan harmoni dalam keberagaman. Peresmian ini bukan sekadar peresmian infrastruktur, melainkan sebuah pernyataan filosofis yang kuat tentang *“memperkuat simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, serta menciptakan koneksi fisik dan simbolis antara kedua tempat ibadah yang penting tersebut”*.

#### **GAMBAR 1, Terowongan Silaturahmi**



#### **Kontribusi Islam dalam Sistem Pendidikan Indonesia**

Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pendidikan agama di seluruh institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, yang diwujudkan melalui program bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan agama sesuai rekomendasi Badan Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada 27 Desember 1945. Dalam



putusannya, BPKNP menegaskan bahwa madrasah dan pesantren sebagai institusi pendidikan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia patut menerima dukungan komprehensif dari pemerintah, baik berupa bimbingan akademis maupun bantuan material, mengingat peran strategis lembaga-lembaga tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan rakyat.

Di tengah situasi revolusi fisik pasca-proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah memulai langkah reformasi di sektor pendidikan sebagai bidang prioritas strategis. Pemerintah kemudian membentuk Kementerian PP&K (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan) sebagai institusi yang bertanggung jawab melakukan penyesuaian sistem pendidikan sesuai tuntutan zaman.

Kebijakan pendudukan Jepang turut memajukan pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Pertama, transformasi Kantor Urusan Agama menjadi Kementerian Agama yang mendirikan PGA, SGHA, ADIA (kini UIN/STAIN), diikuti Muhammadiyah dan NU. Kedua, Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan mewajibkan pengajaran agama di semua sekolah, mensyaratkan kompetensi umum bagi guru agama, menyelenggarakan pendidikan calon guru agama, serta meningkatkan kualitas madrasah dan pesantren. Masyumi juga berperan sebagai representasi politik umat Islam dalam mendorong kebijakan tersebut. Namun, pada 1959-1965, Demokrasi Terpimpin ala Soekarno mengubah dasar pendidikan dari Pancasila ke Pancacitra (sosialis), sehingga pendidikan agama sempat dihapuskan, lalu dihidupkan kembali pada 1966 pasca Orde Baru.

### **Pendirian Universitas Islam dalam Memajukan Ilmu Pengetahuan**

Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia memainkan peran strategis dalam pengembangan masyarakat multikultural melalui penguatan toleransi antarumat beragama, lintas etnis, dan berbagai kelompok sosial. Secara khusus, UIN Sumatera Utara mengimplementasikan paradigma *wahdatul ulum* (integrasi ilmu agama dan umum) serta moderasi beragama sebagai landasan filosofis institusional. Sementara itu, tiga UIN di Jawa Timur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN KH Achmad Siddiq Jember menerapkan moderasi beragama berdasarkan nilai-nilai *wasathiyah* dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tetap berkomitmen pada akidah, tauhid, dan syariat Islam, serta secara tegas menolak interpretasi literal sempit maupun klaim eksklusivisme dalam memahami doktrin agama.



Ketiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ini mengutamakan nilai-nilai musyawarah, keadilan, kebebasan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sambil menjauhi sikap fanatik yang berlebihan. Mereka lebih memilih mengedepankan sikap terbuka, toleran, dan saling menghormati sebagai jalan keluar dari potensi konflik dan permusuhan. Dalam menyelesaikan permasalahan, ketiganya menerapkan pendekatan moderat dengan membangun hubungan dan kerja sama yang harmonis.

### 3.2 Analisis

#### **Analisis Kontribusi Islam dalam Membangun Indonesia Perspektif Moderasi Beragama**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat dianalisis bahwa moderasi beragama telah menjadi strategi fundamental dalam kontribusi Islam membangun Indonesia di berbagai dimensi. Dalam ranah politik, moderasi beragama tercermin dari sikap para tokoh Muslim seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo yang dengan ikhlas menerima penghapusan tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dari Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan prinsip kemaslahatan bersama di atas kepentingan kelompok, menghormati aspirasi masyarakat non-Muslim, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan musyawarah. Sebagaimana dicatat Ma'arif (2006), penerimaan terhadap penghapusan tersebut bukanlah bentuk kekalahan politik Islam, melainkan kemenangan akhlak mulia yang mengajarkan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan tanpa harus memaksakan kehendak mayoritas.

Dalam ranah pendidikan, moderasi beragama diwujudkan melalui integrasi kurikulum agama dan ilmu umum yang ditunjukkan oleh berbagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren Persis telah menerapkan sistem pembagian proporsi 60 persen materi keagamaan dan 40 persen ilmu umum pada jenjang Tsanawiyah sejak tahun 1950, sementara Muhammadiyah sejak awal berdirinya pada 1912 telah menggabungkan kurikulum agama dengan matematika, sains, dan bahasa Belanda. NU melalui jaringan pesantren multidimensi seperti Tebuireng dan Lirboyo mengajarkan keterampilan vokasional dan kewirausahaan di samping ilmu agama. Dari perspektif moderasi beragama, integrasi ini menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, menyiapkan warga negara yang kompeten secara religius dan profesional, sekaligus menjembatani tradisi dan modernitas tanpa kehilangan identitas keislaman. Lebih jauh lagi, perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN Sumatera Utara dan tiga UIN di Jawa Timur telah



mengimplementasikan paradigma wahdatul ulum serta nilai-nilai wasathiyah yang menolak interpretasi literal sempit dan klaim eksklusivisme dalam memahami doktrin agama.

Sementara itu, dalam ranah sosial kemasyarakatan, moderasi beragama terwujud melalui berbagai praktik toleransi aktif yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Landasan konstitusional telah menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 28E Ayat 1, namun tantangan implementasinya tetap ada dari kecenderungan segelintir kelompok yang memperjuangkan kepentingan komunitasnya secara berlebihan. Moderasi beragama hadir sebagai antitesis dari sikap ghuluw atau berlebihan tersebut, baik dalam bentuk gerakan radikal maupun paham sekuler yang meminggirkan peran agama. Simbol nyata dari moderasi ini adalah pembangunan Terowongan Silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang diresmikan pada 12 Desember 2024, yang secara fisik dan simbolis menghubungkan dua tempat ibadah berbeda. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa moderasi beragama dalam lintasan sejarah Indonesia bukanlah sikap kompromistis yang lemah, melainkan strategi yang kuat dan bijaksana yang memungkinkan Islam berkontribusi secara optimal dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan beradab, dengan prinsip wasathiyah sebagai kunci integrasi nasional di tengah kemajemukan

### **3.3 Diskusi**

#### **Kontribusi Islam dalam Membangun Politik Indonesia**

Dalam sejarah Indonesia, politik tak lepas dari peran Islam sebagai agama mayoritas dan dampak kolonialisme Belanda. Setelah Majapahit mundur, kerajaan Islam bermunculan di luar Aceh, menandakan menguatnya pengaruh Islam di wilayah kecil faktor penting bagi kekuatan asing. Namun, perkembangan Islam tak terlepas dari intervensi Belanda, yang membuka jalur perdagangan di Nusantara yang kaya rempah, subur, dan strategis secara maritim.

Perkembangan Islam politik di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan dinamika rakyat. Gerakan ini bermula dari berdirinya Syarekat Islam (SI) yang menjadi simbol identitas nasional dan semangat kebangsaan bagi umat Islam, sekaligus perekat solidaritas kebangsaan (Raharjo, 1999). Berbeda dengan Budi Utomo yang eksklusif dan hanya untuk priyayi Jawa, Bali, Madura, SI justru merangkul semua golongan di seluruh Indonesia. SI kemudian berganti nama menjadi PSI (1923), PSIHT (1927), dan PSII (1930). Dinamika ini berlanjut dengan lahirnya Permi di Sumatera Utara (1932) dan



PII di Jawa (1938), yang semuanya bertujuan membela umat Islam di tengah penjajahan Belanda (Pringgogidgo, 1967).

Pada Kongres SI di Bandung dan Jakarta tahun 1917, Semaun dari cabang Semarang memperkenalkan pengaruh sosialis-revolusioner melalui dua usulan: menolak keterlibatan dalam Perang Dunia I dan menarik wakil SI dari Volksraad. Usulan pertama ditolak, tetapi agenda anti-kolonial yang membela buruh melawan kapitalis diterima. Berlanjut pada Kongres IV 1919, SI menyetujui usulan Semaun untuk mengorganisir buruh, sehingga SI aktif dalam gerakan serikat pekerja (Sarekat Kerja) serta mengadvokasi pendidikan dan penghapusan kerja paksa (Pringgogidgo, 1967). Sementara itu, setelah kemerdekaan, Persis berkontribusi dalam politik Islam dengan berkolaborasi bersama nasionalis. Saat Soekarno mengusulkan sekularisasi ala Turki, ia menegaskan bahwa pemisahan agama dan negara tak berarti menghilangkan nilai Islam; masyarakat tetap bisa menerapkan Islam lewat demokrasi dan perwakilan rakyat, sehingga dukungan terhadap Islam tumbuh alami tanpa paksaan (Noer, 1987).

Pada awal kemerdekaan, Persis erat kaitannya dengan Partai Masyumi. Setelah berdiri kembali pada 1948, Persis menjadi anggota khusus Masyumi dan mewajibkan anggotanya ikut serta. Tokoh Persis seperti Mohammad Natsir dan Isa Anshary bahkan menduduki posisi strategis di pusat Masyumi. Komitmen politik Persis ditegaskan dalam "Manifes Perjuangan Persis" (1956), yang menyatakan bahwa perjuangannya mencakup akidah, ibadah, politik, dan penyebaran ideologi Islam secara menyeluruh (Abdurrahman, 2012). Persis mendukung pemerintahan Soekarno-Hatta yang sekuler-nasionalis. Menurut Isa Anshary, partisipasi umat Islam adalah kewajiban religius sekaligus upaya membentuk negara berlandaskan Islam. Persis lalu bergabung dalam Dewan Konstituante (1956) sebagai sarana memperjuangkan aspirasi Islam secara konstitusional tanpa meninggalkan NKRI (Federspiel, 1970).

### **Kontribusi Islam dalam Perumusan UUD 1945**

Pertentangan ideologis antara Soekarno (nasionalisme sekuler) dan Mohammad Natsir (nasionalisme Islam) sangat memengaruhi dinamika diskusi di BPUPKI, yang akhirnya melahirkan kompromi politik berupa "Gentlemen's agreement" tentang Piagam Jakarta. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan UUD 1945, meski kemudian dimodifikasi (Hardi, n.d.). Piagam Jakarta dinilai mencerminkan kehendak mayoritas bangsa, baik secara isi maupun komposisi perumusannya yang beragam: Soekarno, Hatta, dan A.A. Maramis (Kristen



sekuler) mewakili kalangan sekuler; sementara Abikoeso Tjokrosoejoso (PSII), Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), Haji Agussalim, Abduh Wahid Hasjim (NU), serta Ahmad Soebardjo dan Muhammad Yamin (nasionalis Muslim sekuler) mewakili unsur Islam.

Dalam sidang paripurna, Wahid Hasyim mengajukan dua usulan: pertama, menyisipkan frasa "yang beragama Islam" pada Pasal 4 Ayat 2 agar Presiden Muslim memudahkan penerapan syariat; kedua, menjadikan Islam sebagai agama resmi negara di Pasal 28, dengan tetap menjamin kebebasan beragama lain. Menurutnya, perlindungan negara berbasis agama punya kekuatan moral lebih besar karena pengorbanan jiwa hanya dibenarkan untuk ideologi berbasis agama (Anshari, 1997). Haji Agus Salim mempertanyakan konsekuensi logis dari syarat Presiden Muslim terhadap posisi Wapres dan duta besar, serta konsistensinya dengan perlindungan agama lain. Sukiman mendukung usulan itu sebagai langkah simbolis tanpa dampak substantif. Sementara itu, Oto Iskandar Dinata menawarkan solusi kompromistis: setuju menghapus Pasal 4 Ayat 2 (usulan Djajadiningrat), namun memasukkan kembali rumusan Piagam Jakarta ke dalam pasal khusus tentang agama (Yamin, 1960).

PPKI awalnya beranggotakan 21 orang, dengan Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta wakil ketua, didampingi Supomo, Radjiman Wedyodiningrat, Wahid Hasyim, serta kemudian diperluas atas usul Soekarno dengan menambahkan enam tokoh termasuk Ki Hajar Dewantara dan Kasman Singodimedjo. Dalam rapat pagi itu, agenda utama adalah merevisi Piagam Jakarta, terutama Mukadimah dan batang tubuhnya, sebagai dasar UUD 1945. Hatta memaparkan empat amendemen: 1) "Mukaddimah" menjadi "Pembukaan"; 2) frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"; 3) Pasal 6 ayat 1 menghapus kata "dan beragama Islam"; 4) Pasal 28 ayat 1 menjadi "negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" (Yamin, 1960). Piagam Jakarta yang disahkan 22 Juni 1945 merupakan kesepakatan antara Islamis dan nasionalis sekuler. Meski direvisi 18 Agustus 1945, pengaruh Islam tetap terlihat dari frasa "kewajiban menjalankan syariat Islam" pada sila pertama Pancasila, yang kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Tokoh Muslim seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo ikhlas menerima penghapusan "tujuh kata" demi integrasi nasional dan menghormati aspirasi masyarakat non-Muslim, terutama dari Indonesia timur (Ma'arif, 2006).

### **Kontribusi Islam dalam Mempersatukan Keberagaman Masyarakat Indonesia**



Masyarakat Indonesia sangat beragam, tidak hanya dari segi demografi tetapi juga bahasa, budaya, agama, dan etnis. Keragaman ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun kesatuan dalam multikulturalisme, yang memerlukan prinsip seperti etika sosial dan peran negara dalam menciptakan konsensus. Toleransi menjadi perekat harmoni sosial di tengah berbagai perbedaan (Putri, 2021). Sebagai bangsa, Indonesia berlandaskan pada sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang dikuatkan oleh Pasal 29 UUD 1945: negara mengakui dasar ketuhanan dan melindungi kebebasan beragama. Pemerintah mengakui enam agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu), dan kebebasan beragama sebagai hak asasi dilindungi Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945 tanpa memecah belah persatuan.

Kerukunan antaragama di Indonesia sering diwarnai ketegangan yang berisiko memicu konflik horizontal. Hal ini muncul akibat kecenderungan sebagian kelompok agama yang terlalu memaksakan kepentingan komunitasnya tanpa menghargai hak kelompok lain. Polarisasi ekstrem, baik dari gerakan Islam radikal maupun paham komunisme, telah memicu berbagai gejolak sosial dalam sejarah bangsa (Salsabila Azahra & Zaenul Slam, 2022). Moderasi beragama menjadi jembatan yang menyatukan religiositas dan nasionalisme. Upaya bersama diperlukan agar toleransi antaragama menjadi perekat persatuan. Untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan berbudaya luhur, moderasi beragama merupakan syarat mutlak bagi keutuhan NKRI.

Masyarakat Indonesia telah mewujudkan komitmen nyata dalam mempererat hubungan antarumat beragama melalui pembangunan terowongan penghubung antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi menginaugurasi Terowongan Silaturahmi pada Kamis, 12 Desember 2024. Proyek infrastruktur ini memiliki makna yang jauh melampaui aspek fisik semata, melainkan merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia. Terowongan tersebut tidak hanya menghubungkan dua bangunan ibadah secara fisik, tetapi juga menciptakan ikatan simbolis yang merepresentasikan harmoni dalam keberagaman. Peresmian ini bukan sekadar peresmian infrastruktur, melainkan sebuah pernyataan filosofis yang kuat tentang *"memperkuat simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, serta menciptakan koneksi fisik dan simbolis antara kedua tempat ibadah yang penting tersebut"*.



Adapun Menag Nasaruddin mengungkap makna filosofi di balik pembangunan Terowongan Silaturahmi yang digagas era Presiden Joko Widodo itu."Adapun filosofi pembangunan Terowongan Silaturahmi ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antara umat beragama, di mana di dalamnya terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antarumat beragama di Indonesia"(Hawari, 2024).

### **Kontribusi Islam dalam Sistem Pendidikan Indonesia**

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus pada pengembangan pendidikan agama di semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Langkah nyata pertamanya adalah program bantuan untuk lembaga pendidikan agama, sesuai rekomendasi Badan Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada 27 Desember 1945. Dalam putusannya, BPKNP menyatakan bahwa madrasah dan pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang sudah mengakar kuat di masyarakat, layak mendapat dukungan penuh dari pemerintah baik bimbingan akademis maupun bantuan materi karena peran strategisnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan rakyat (Hasbullah, 1996).

Meskipun tengah menghadapi revolusi fisik pasca-proklamasi, Indonesia menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis dengan membentuk Kementerian PP&K (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan) untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Menyadari pentingnya peran agama dalam pembangunan bangsa, pada awal Januari 1946 dibentuk pula Departemen Agama. Lembaga ini bertugas mengoordinasikan pendidikan keagamaan di berbagai jenjang, mulai dari sekolah umum hingga madrasah dan pesantren (Asrohah, 1999).

Kebijakan masa pendudukan Jepang turut memajukan pendidikan Islam di era kemerdekaan. *Pertama*, transformasi Kantor Urusan Agama menjadi Kementerian Agama melahirkan lembaga seperti PGA, SGHA, ADIA, yang berkembang menjadi PTAIN, IAIN, dan kini sebagian menjadi UIN/STAIN. Swasta seperti Muhammadiyah dan NU juga mendirikan perguruan tinggi agama. Sementara itu, Kementerian Pengajaran di bawah Menteri Suwandi mewajibkan pengajaran agama di semua sekolah, menetapkan standar guru agama, menyelenggarakan pendidikan calon guru agama, serta meningkatkan kualitas madrasah dan pesantren. *Kedua*, Masyumi sebagai representasi politik umat Islam memperkuat basis sosiologis dan kebijakan pro-pendidikan Islam, termasuk kewajiban pengajaran agama. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) ala Soekarno yang berbasis Nasakom,



tujuan pendidikan diubah dari Pancasila menjadi Pancacitra (sosialis), sehingga pendidikan agama sempat dihapus. Baru setelah Orde Baru lahir pada 1966, MPRS mewajibkan kembali pembelajaran agama dari SD hingga perguruan tinggi (Faisal, 1995).

Pada akhir 1980-an, sistem pendidikan Islam berubah signifikan dengan disahkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbeda dari aturan sebelumnya yang hanya fokus pada pendidikan sekolah, undang-undang ini mencakup pendidikan formal dan non-formal, termasuk akademik, profesi, vokasi, dan pendidikan keagamaan. Sebelum UU ini dan UU No. 20 Tahun 2003, madrasah sebenarnya sudah diakui setara dengan sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan melalui SKB 3 Menteri tahun 1976 (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri P dan K) yang menyetarakan ijazah madrasah. Pengakuan ini diperkuat oleh SKB 2 Menteri tahun 1984 (No. 0.45/1984 dan No. 0299/V/1984) tentang penyesuaian kurikulum madrasah dengan sekolah umum, serta memberikan hak lulusan madrasah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah umum (Iswantir.M, 2013).

Pada pertengahan 1930-an, Persatuan Islam (Persis) mendirikan Pesantren Persis di Bandung di bawah bimbingan Hasan Hamid dan E. Abdurrahman, dengan dua tingkat: Pesantren Kecil (sore hari untuk anak-anak) dan Pesantren Besar (untuk remaja) yang digagas A. Hassan pada Maret 1936. Ketika A. Hassan pindah ke Bangil, Jawa Timur pada 1940, Pesantren Besar ikut dipindahkan dan dikembangkan, lalu ditambah pesantren khusus perempuan pada Februari 1941 untuk mencetak kader wanita Persis. Kedua pesantren ini berperan penting sebagai pusat kaderisasi dan perjuangan Persis di masa penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan (Iswantir.M, 2013). Selanjutnya, E. Abdurrahman dan Abdullah mengembangkan sistem pesantren dengan menambah jenjang Tsanawiyah pada 1950, menggunakan kurikulum proporsi 60:40. Sebanyak 60% materi keagamaan meliputi Hadis (termasuk Musthalahul Hadis, Rijalul Hadis, Riwayat Hadis), Fiqih dan Ushul Fiqih, serta Bahasa Arab (Nahwu Sharaf, Balaghah). Sebagian besar rujukan berbahasa Indonesia karya A. Hassan, ditambah sedikit literatur Arab. Sisanya 40% adalah mata pelajaran umum: Bahasa Indonesia dan Inggris, Matematika Dasar, Ilmu Bumi, Psikologi, Kesehatan, dan Pedagogi.

Karakter religius bangsa Indonesia termanifestasi dalam sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan diperkuat oleh Pasal 29 UUD 1945 yang mengakui ketuhanan sebagai dasar negara serta menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga. Pemerintah



secara resmi mengakui enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebebasan beragama sebagai hak konstitusional juga dijamin Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945, mencerminkan penghormatan terhadap HAM. Sebagai aksi nyata persatuan antarumat beragama, pada 12 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Peresmian ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan pernyataan filosofis untuk memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia melalui koneksi fisik dan simbolis antara kedua tempat ibadah penting tersebut (Hawari, 2024).

Pada 1950, E. Abdurrahman dan Abdullah memodernisasi pesantren Persis dengan membuka jenjang Tsanawiyah yang memadukan kurikulum agama dan umum dalam komposisi 60:40. Materi agama meliputi studi Hadis (*Musthalahul Hadis, Rijalul Hadis, Riwayat Hadis*), Fiqih dan *Ushul Fiqih*, serta Bahasa Arab (*Nahwu Sharaf, Balaghah, Bayan, Badi', Ma'ani*). Sebagian besar referensi agama berbahasa Indonesia karya A. Hassan, dengan sedikit literatur Arab. Mata pelajaran umum terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Dasar, Ilmu Bumi, Psikologi, Kesehatan, dan Pedagogik. Sementara itu, Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912 menjadi pelopor pendidikan modern dengan menggabungkan agama dan ilmu umum, misalnya melalui HIS model Muhammadiyah yang mengajarkan matematika, sains, dan bahasa Belanda selain agama. Pada 2023, Muhammadiyah mengelola lebih dari 10.000 lembaga pendidikan dari TK hingga PT (misal: Universitas Muhammadiyah Malang). Pendekatan ini melahirkan generasi Muslim yang menguasai ilmu duniawi tanpa meninggalkan nilai Islam sekaligus merespons kolonialisme dan keterbelakangan (Azra, 2004). Konsep "Pendidikan Holistik" Muhammadiyah juga mendorong kesetaraan gender, dengan 65% siswanya adalah perempuan.

NU, melalui jaringan pesantrennya, awalnya mempertahankan sistem pendidikan tradisional berbasis kitab kuning dan metode sorogan. Namun sejak 1970-an, NU melakukan modernisasi dengan mendirikan madrasah yang mengintegrasikan kurikulum nasional, seperti Madrasah Tsanawiyah NU. Pesantren Tebuireng dan Lirboyo menjadi model "pesantren multidimensi" yang mengajarkan agama, keterampilan vokasional (pertanian, teknologi), dan kewirausahaan (Dhofier, 2011). Pada 2020, NU mengelola lebih dari 28.000 pesantren dan 6.000 madrasah di seluruh Indonesia. Kontribusi NU juga terlihat dalam pengembangan



Universitas Islam Negeri (UIN), di mana tokoh NU seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendorong integrasi ilmu sosial-humaniora dengan studi Islam.

### **Pendirian Universitas Islam dalam Memajukan Ilmu Pengetahuan**

Asal-usul PTKIN (dahulu PTI atau PTAIN) berawal dari keinginan umat Islam Indonesia di era kolonial untuk memiliki perguruan tinggi berbasis agama. Keinginan ini muncul sebagai respons terhadap Politik Etis Belanda yang dinilai tidak tulus dan lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kemajuan pendidikan pribumi, terbukti dari minimnya mahasiswa pribumi di perguruan tinggi umum yang sekuler, serta akses terbatas hanya bagi priyayi, abangan, dan non-Muslim (Benda, 1980). Dalam majalah *Pedoman Masyarakat* edisi ke-15, Dr. Satiman menyampaikan aspirasi mendirikan perguruan tinggi Islam di Jakarta, Solo, dan Surabaya. Meski masih konseptual, antusiasme masyarakat Muslim sudah nyata sejak 1930-an. Realisasi cita-cita ini terjadi ketika Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) mendirikan perguruan tinggi Islam pertama di Sumatera Barat pada 9 Desember 1940, menurut catatan Mahmud Yunus (Daulay, 2007).

Selama pendudukan Jepang pada 1941, semua pendidikan tinggi Islam di Indonesia berhenti beroperasi akibat kebijakan militer Jepang. Namun semangat pendidikan Islam bangkit kembali dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pada 8 Juli 1945, yang merupakan inisiatif Masyumi, organisasi keagamaan berpengaruh saat itu (Daulay & Pasa, 2012). Saat ini, Universitas Islam Negeri (UIN) berperan strategis dalam mengembangkan masyarakat multikultural melalui penguatan nilai toleransi antaragama, etnis, dan kelompok sosial. Khususnya, UIN Sumatera Utara menerapkan paradigma *wahdatul ulum* (integrasi ilmu agama dan umum) serta mengembangkan moderasi beragama sebagai landasan filosofis institusional (Al-Mujtahid et al., 2022).

Tiga PTKIN di Jawa Timur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN KH Achmad Siddiq Jember menerapkan moderasi beragama dengan pilar utama nilai-nilai *wasathiyah* dari Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa meninggalkan akidah, tauhid, dan syariat Islam, serta menolak interpretasi literal-sempit maupun eksklusivisme beragama (Susanto, 2019). Ketiga UIN ini juga mengedepankan musyawarah, keadilan, kebebasan, dan HAM, sementara menghindari fanatisme berlebihan. Sebaliknya, mereka mengedepankan keterbukaan, toleransi, dan saling menghargai sebagai alternatif dari konflik, menyelesaikan



masalah secara moderat melalui relasi harmonis dan kerja sama. Selain itu, mereka menerapkan pendekatan pluralistik dan konsultatif dalam menjaga perdamaian, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau individu, serta mengedepankan dialog dan konsensus (Basid & Halimi, 2024).

Dengan demikian, penerapan moderasi beragama di universitas-universitas Islam tidak semata-mata bersumber dari nilai-nilai Islam yang autentik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip universal seperti keadilan, hak asasi manusia, serta kebijaksanaan kolektif sebagai respons terhadap tantangan kekinian. Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi Islam berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang moderat dan memperkuat persatuan umat.

#### **4. KESIMPULAN**

Islam telah memberikan kontribusi multidimensi dalam pembentukan dan perkembangan bangsa Indonesia, mencakup aspek politik, pendidikan, sosial, dan konstitusional. Sejak awal kedatangannya, Islam tidak hanya berperan sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi fondasi gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, seperti yang tercermin dalam Perang Diponegoro dan Perang Aceh. Nilai-nilai keislaman ini kemudian berpadu dengan semangat nasionalisme, melahirkan kesadaran kebangsaan yang kuat dan mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Dalam ranah politik, organisasi Islam seperti Syarikat Islam (SI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membentuk identitas negara. Tokoh-tokoh Muslim seperti Mohammad Natsir dan KH Wahid Hasyim terlibat dalam perumusan dasar negara, termasuk Piagam Jakarta, yang meskipun mengalami modifikasi, tetap memengaruhi sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini menunjukkan kemampuan Islam beradaptasi dengan prinsip negara pluralistik sambil mempertahankan nilai-nilai universalnya.

Di bidang pendidikan, Islam berkontribusi melalui lembaga seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam yang menggabungkan kurikulum agama dan umum. Organisasi seperti Muhammadiyah dan NU tidak hanya memajukan pendidikan tetapi juga mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat. Integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, seperti melalui UU No. 2 Tahun 1989, semakin memperkuat perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.



Islam juga berperan penting dalam mempersatukan keberagaman masyarakat Indonesia melalui moderasi beragama dan toleransi. Inisiatif seperti pembangunan Terowongan Silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral menjadi simbol nyata upaya menjaga kerukunan antarumat beragama. Nilai-nilai Islam yang inklusif dan menghargai perbedaan telah menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis di tengah pluralitas Indonesia.

Secara keseluruhan, kontribusi Islam dalam membangun bangsa Indonesia bersifat holistik, mencakup dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan politik. Dengan berpegang pada prinsip moderasi, keadilan, dan persatuan, Islam terus menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa nilai-nilai Islam yang adaptif dan inklusif tidak hanya relevan dalam sejarah, tetapi juga menjadi kunci bagi pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan beradab di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2012). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar:Teori, Diagnosis, dan Remediasinya*. Rineka Cipta.
- Al-Mujtahid, N. M., Alfikri, M., & Sumanti, S. T. (2022). Penguatan Harmoni Sosial Melalui Moderasi Beragama dalam Surah Al-Kafirun Perspektif Komunikasi Pembangunan (Analisis UINSU “Kampus Moderasi Beragama”). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 531–544. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2042>
- Anshari, E. S. (1997). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Gema Insani Press.
- Asrohah, H. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos.
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. Allen & Unwin.
- Basid, A., & Halimi, H. (2024). Praktik Kehidupan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia. *Kontekstualita*, 38(01), 13–26. <https://doi.org/10.30631/38.01.13-26>
- Benda, H. J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Pustaka Jaya.
- Boland, B. . (1971). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Martinus Nijhoff.
- Daulay, H. P. (2007). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Daulay, H. P., & Pasa, N. (2012). *Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan bangsa*. Rineka Cipta.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai*



*Masa Depan Indonesia*. LP3ES.

- Faisal, J. A. (1995). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Gema Insani Press.
- Federspiel, H. M. (1970). *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia, Ithaca*. Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University.
- Hardi. (n.d.). *Menarik Pelajaran dari Sejarah*. Haji Masagung.
- Hasbullah. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Rajawali Press.
- Hawari, H. (2024). *resmi dibuka menag ungkap filosofi terowongan silaturahmi istiqlal katedral*. Detik News.
- Hefner, R. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Iswantir.M. (2013). *Sejarah , Peran dan Kontribusi dalam Sistem Pendidikan Nasional*. AURA.
- Ma'arif, S. (2006). *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. LP3ES.
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Pringgodigdo, A. . (1967). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Dian Rakyat.
- Putri, N. M. A. A. (2021). Peran Penting Moderasi Beragama dalam Menjaga Kebinekaan Bangsa Indonesia. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 7, 12–18.
- Raharjo, M. D. (1999). *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Mizan.
- Ricklefs, M. . (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Susanto, E. (2019). *Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Penerbit Akademia.
- Woodward, M. (2011). *Java, Indonesia and Islam*. Springer.
- Yamin. (1960). *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, jild. I*. Yayasan Prapanca.

